

Nomor : B/ 920 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
di
Sekayu

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah (Pemda) maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang

disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan kualitas perencanaan kinerja melalui pelaksanaan asistensi dan *coaching clinic* tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi AKIP, serta pembinaan kepada Perangkat Daerah (PD) terkait perbaikan pohon kinerja;
- b. Melaksanakan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan menyesuaikan Perjanjian Kinerja (PK) dengan RPJMD Perubahan;
- c. Membangun sistem aplikasi berbasis web equip.mubakab.go.id yang digunakan untuk monitoring kinerja;
- d. Melakukan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja secara lebih mendalam kepada seluruh PD di Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan nilai sebesar **65,98** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“baik”**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,28
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,38
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,88
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,45
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,98
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih

menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level Pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup RPJMD tahun 2017-2022 yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra dan PK baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator “Persentase Lembaga sosial yang berdaya” yang dimiliki Dinas Sosial dalam mendukung sasaran “Meningkatkan pelayanan terhadap disabilitas”;
- b. Sasaran strategis pada dokumen perencanaan sebagian PD seperti Renstra, Rencana Kerja (Renja) dan PK belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) tetapi masih menunjukkan proses atau *output*;
- c. Penjenjangan kinerja belum sesuai dengan level jabatannya, contohnya pada Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja dan belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat;
- d. Program dan kegiatan yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan pada sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas;
- e. Pelaksanaan program-program prioritas pembangunan belum memperhatikan adanya *crosscutting* program lintas PD secara optimal. Masing-masing PD melaksanakan program dan kegiatan di organisasinya tanpa memperhatikan aspek kolaborasi dengan unit kerja lain.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan perangkat daerahnya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda dan PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemberian *reward and punishment* belum berdampak pada capaian kinerja;

- b. Aplikasi equip.mubakab.go.id belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi progress capaian kinerja Pemerintah Daerah dan PD. Hal tersebut ditunjukkan dengan data capaian yang belum terdapat pada tingkat PD.
- c. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada sebagian PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran, sedangkan kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat Pemda maupun tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja Pemda maupun PD belum dipublikasikan secara umum;
- b. Kualitas pengungkapan informasi kinerja dalam laporan kinerja masih terbatas, yaitu belum sepenuhnya menyajikan analisis capaian kinerja yang komprehensif, seperti faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian dan tidak tercapainya kinerja organisasi, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian target kinerja;
- c. Laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pimpinan PD sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Contohnya pada PK Bupati Tahun 2022, yaitu sasaran strategis “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat” dengan indikator “Pertumbuhan Ekonomi” dengan target tahun 2022 adalah 2,50-3,00 sedangkan realisasi capaian di tahun 2021 adalah 3,42.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD dan telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam mewujudkan budaya kinerja tinggi. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi belum disampaikan secara lengkap, sehingga belum dapat disimpulkan apakah rekomendasi yang diberikan cukup untuk

- memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada PD;
 - c. Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan perencanaan kinerja dengan memperhatikan kaidah: manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat (*result oriented*) dan keterpaduan perencanaan pembangunan (*integrated development plan*);
- 2) Melakukan reviu dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra PD, Renja dan PK agar memastikan telah berorientasi hasil (*outcome*) serta selaras dengan IKU;
- 3) Melakukan reviu dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas penjenjangan/*cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke terendah dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja;
- 4) Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja (*program follow result and money follow program*) seluruh PD;
- 5) Mengembangkan aplikasi SAKIP terintegrasi yang mencakup *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-SAKIP*, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana monitoring evaluasi kinerja secara bulanan atau triwulan dan menjamin keandalan, akurasi pengumpulan data kinerja, guna mendukung budaya kinerja organisasi di berbagai level;
- 6) Memastikan tersedianya ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan sampai kepada individu secara spesifik, relevan dan terukur, serta memastikan seluruh SKP yang disusun menggambarkan kinerja yang berorientasi hasil didasarkan pada PK;
- 7) Hasil pengukuran kinerja organisasi dan individu agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan *reward and punishment*;
- 8) Menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah maupun PD melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;

- 9) Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat Pemda dan PD dengan menyajikan analisis yang memadai atas pencapaian kinerja yang berorientasi hasil dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan PD memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- 10) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Selatan;
4. Bupati Musi Banyuasin.